



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

## 2013

### PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta

Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415

Email : [pengadilan\\_tinggi\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id)

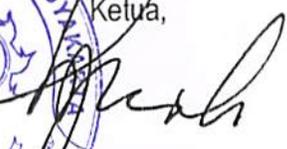
Website : [www.pt-yogyakarta.go.id](http://www.pt-yogyakarta.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu kinerja selama Tahun 2013.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Tahun 2013, mempunyai 3 (tiga) program yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berusaha secara maksimal agar ketiga program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2014 telah kami susun, yang tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan untuk disampaikan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung RI. Kiranya atas kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut, kami mohon saran dan kritik yang membangun demi kemajuan bersama. Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan memacu kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
Ketua,  
  
  
SUGENG ACHMAD YUDHI, SH  
NIP. 19471108 197407 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	1
C. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta .....	1
D. Sistematika Penyajian .....	2
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b> ...	3
A. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014.....	3
1. Visi dan Misi .....	3
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	3
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	4
B. Rencana Kinerja Tahun 2013.....	4
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013.....	6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	8
A. Pengukuran Kinerja .....	8
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	10
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	18
A. Kesimpulan .....	28
B. Saran.....	28
<b>BAB V LAMPIRAN</b> .....	29
1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	
2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta	
3. Rencana Kinerja Tahun 2013	
4. Penetapan Kinerja Tahun 2013	
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2013	
6. Matriks Rencana Strategis Review 2010 – 2014	

## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2012 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi yang melaporkan "Pencapaian Kinerja" selama Tahun 2013 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pencapaian target kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara keseluruhan pada tahun 2013 telah mencapai 89,19%, yang dapat dilihat dari sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target. Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Tahun 2013 mempunyai 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan instansi vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif, Mahkamah Agung RI, yang berkedudukan di ibukota propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi Yogyakarta membawahi 5 Lingkungan Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pengadilan Negeri Sleman
3. Pengadilan Negeri Bantul
4. Pengadilan Negeri Wates
5. Pengadilan Negeri Wonosari

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Mahkamah Agung RI serta publik. Untuk itulah, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir.

#### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

##### **1. Tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta**

Pengadilan Tinggi mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan mengadili Perkara Pidana dan Perkara Perdata di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

##### **2. Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

#### **C. ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dibantu oleh Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi, Panitera/ Sekretaris, Wakil Panitera, dan Para

Panitera Muda, yang mana para pejabat tersebut bersifat teknis yang dilaksanakan dibagian kepaniteraan dan tugas yang bersifat administrasi umum dilaksanakan oleh bagian kesekretariatan, yakni Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Ka Sub Bagian Umum, Ka Sub Bagian Kepegawaian, Ka Sub Bagian Keuangan.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Yogyakarta disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

##### **KATA PENGANTAR**

##### **DAFTAR ISI**

##### **EXECUTIVE SUMMARY**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- D. Sistematika Penyajian

##### **BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014
  - 1. Visi dan Misi
  - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
  - 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Rencana Kinerja Tahun 2013
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2013

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

##### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran – saran

##### **BAB V LAMPIRAN**

- 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- 2. Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- 3. Rencana Kinerja Tahun 2013
- 4. Penetapan Kinerja Tahun 2013
- 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2013
- 6. Matriks Rencana Strategis Review 2010 – 2014

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014

##### 1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, yang dapat dijabarkan menjadi :

##### **VISI :**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung, visi Pengadilan Tinggi selaras dengan visi Mahkamah Agung yaitu:

***"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung"***

##### **MISI :**

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu ditetapkan misi Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan

##### 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Tinggi mempunyai 2 (dua) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

###### a. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.

Sasaran dari tujuan di atas yaitu :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan kualitas pengawasan
4. Meningkatnya Kualitas SDM
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung

###### b. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Sasaran dari tujuan di atas yaitu :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)

### 3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

#### Program Utama

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditentukan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai Program Utama Tahun 2010-2014 sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- c. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

#### Kegiatan Pokok

Program tersebut di atas dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok selama Tahun 2010-2014 yaitu :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara .
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- d. Meningkatnya kualitas pengawasan.
- e. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
- f. Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung

### B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Rencana Kinerja Tahun 2013 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %

		h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
		i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %

6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %
----	--	---	-------

### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan Kinerja Tahun 2013 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
		h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
		i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %

		d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100%
		c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	0%
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %	80%
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %	93%
		f. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	100%
		g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %	100%
		h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %	100%
		i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %	100%

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%
		c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100%
		d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100%
		e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %

5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %	100 %
<b>RATA-RATA</b>				<b>89, 19%</b>

## B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada akhir Tahun 2013 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dapat dilihat dari sasaran dan target yang telah ditentukan dengan capaian hasilnya yaitu sebagai berikut :

### 1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 9 (sembilan) indikator, yaitu Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan, Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan, Persentase perkara perdata yang diselesaikan, Persentase perkara pidana yang diselesaikan, Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan, Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2013 %	Realisasi 2013 %	Realisasi 2012 %	Realisasi 2011 %
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	100	100
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100	100	100	100
c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100	0	-	-

d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100	80	77	62
e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100	93	90	93
f. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100	100	-	-
g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100	100	100	100
h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100	100	100	100
i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100	100	100	100

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

**a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan**

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Persentase %
2011	42	42	100
2012	33	33	100
2013	22	22	100



**b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan**

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Persentase %
2011	11	11	100
2012	9	9	100
2013	10	10	100



**c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan**

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Persentase %
2013	0	0	0%

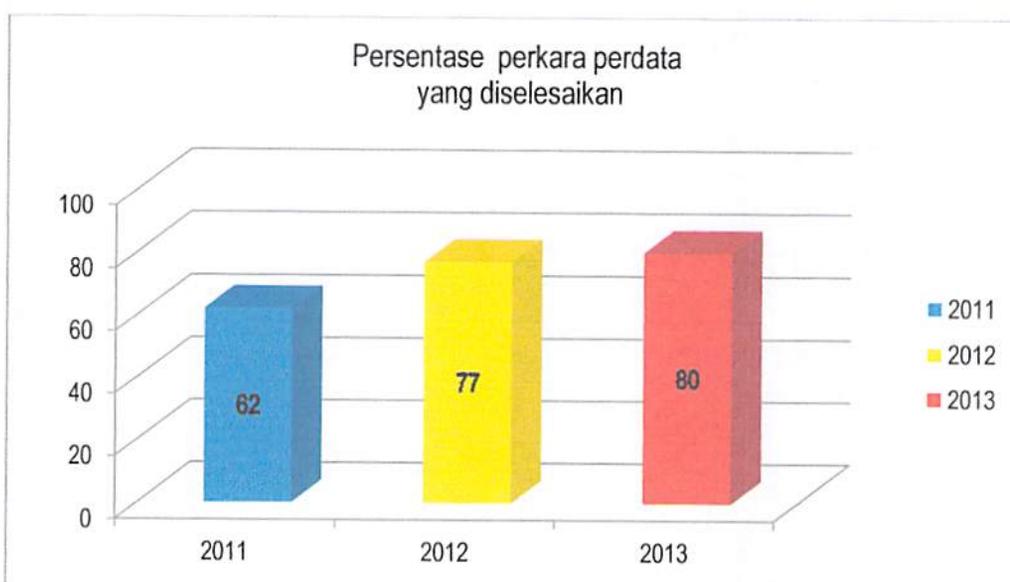


Keterangan :

Pencapaian pada sasaran ini sebesar 0 % dikarenakan tidak ada sisa perkara tindak pidana korupsi (Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi baru terbentuk pada tahun 2013).

**d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan**

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Persentase %
2011	42	87	96	33	62
2012	33	97	108	22	77
2013	22	118	113	27	80



e. **Persentase perkara pidana yang diselesaikan**

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Putus Sela	Cabut	Sisa Akhir Tahun	Persentase %
2011	11	152	153	-	1	9	93
2012	9	123	120	2	-	10	90
2013	10	142	142	-	-	10	93



Keterangan :

Penyelesaian Perkara baik perkara perdata dan pidana belum dapat mencapai 100% dikarenakan banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 maka dalam penyelesaiannya akan menjadi sisa perkara dalam akhir bulan atau akhir tahun. Dan sisa perkara tersebut akan selesai di awal tahun berikutnya.

f. **Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan**

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Persentase %
2013	0	38	38	0	100



Keterangan :

Pengukuran penyelesaian perkara tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan secara terpisah pada tahun 2013 seiring dengan terbentuknya Kewanitaraan Tipikor. Untuk tahun sebelumnya, masih menjadi satu dengan perkara pidana (Kewanitaraan Pidana).

**g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan**

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Persentase %
2011	42	87	96	96	100
2012	33	97	108	108	100
2013	22	118	113	113	100



- h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Putus Sela	Cabut	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Persentase %
2011	11	152	153	-	1	153	100
2012	9	123	120	2	-	120	100
2013	10	142	142	-	-	142	100



- i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Persentase %
2013	0	38	38	38	100



Keterangan :

Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013.

## 2. Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator yaitu Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis, Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis, Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

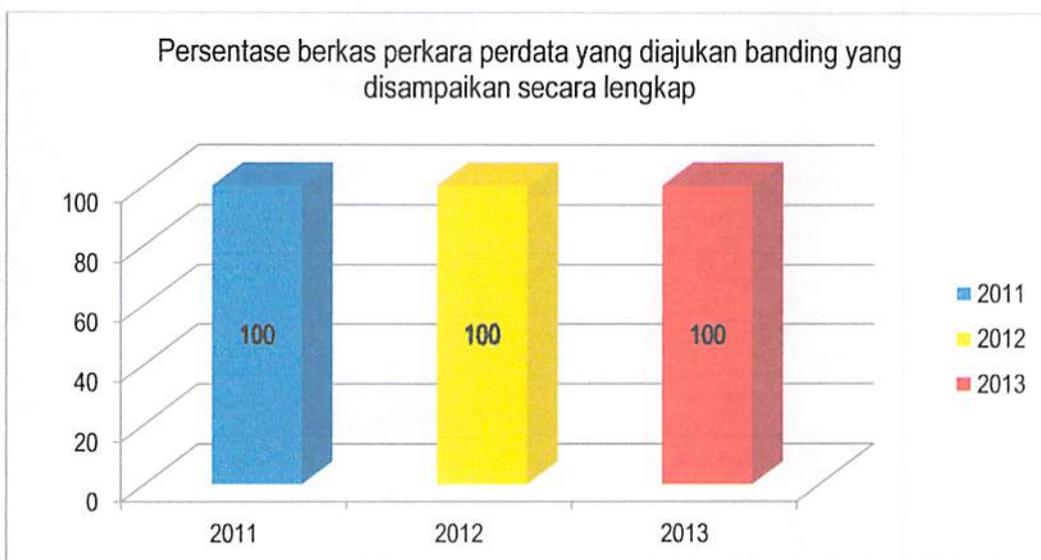
Indikator Kinerja	Target 2013 %	Realisasi 2013 %	Realisasi 2012 %	Realisasi 2011 %
a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100	100	100	100

b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100	100	100	100
c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100	100	100	100
d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100	100	100	100
e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100	100	100	100
f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100	100	100	100

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

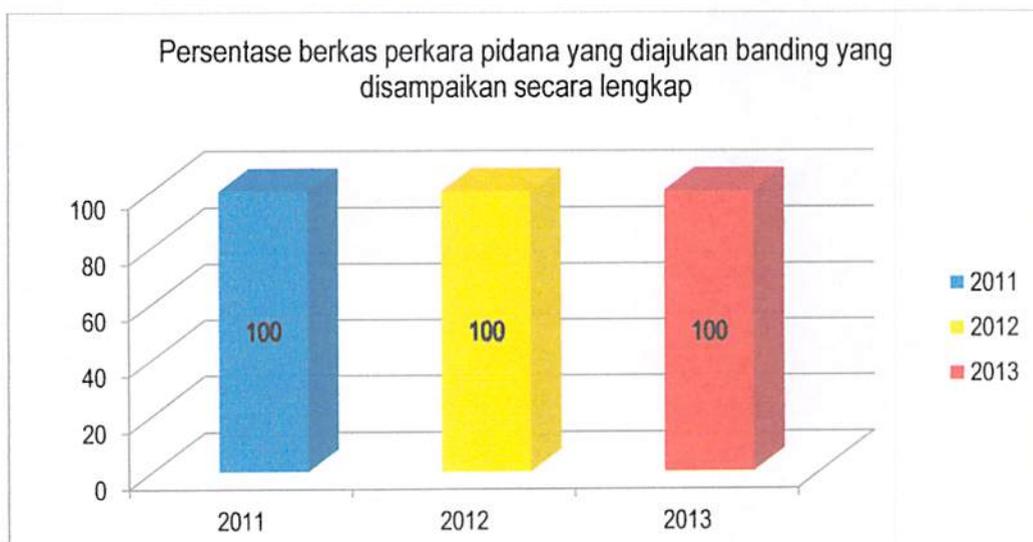
a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Tahun	Masuk	Dinyatakan lengkap	Persentase %
2011	87	87	100
2012	97	97	100
2013	118	118	100



**b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap**

Tahun	Masuk	Dinyatakan lengkap	Persentase %
2011	152	152	100
2012	123	123	100
2013	142	142	100



**c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap**

Tahun	Masuk	Dinyatakan lengkap	Persentase %
2013	38	38	100

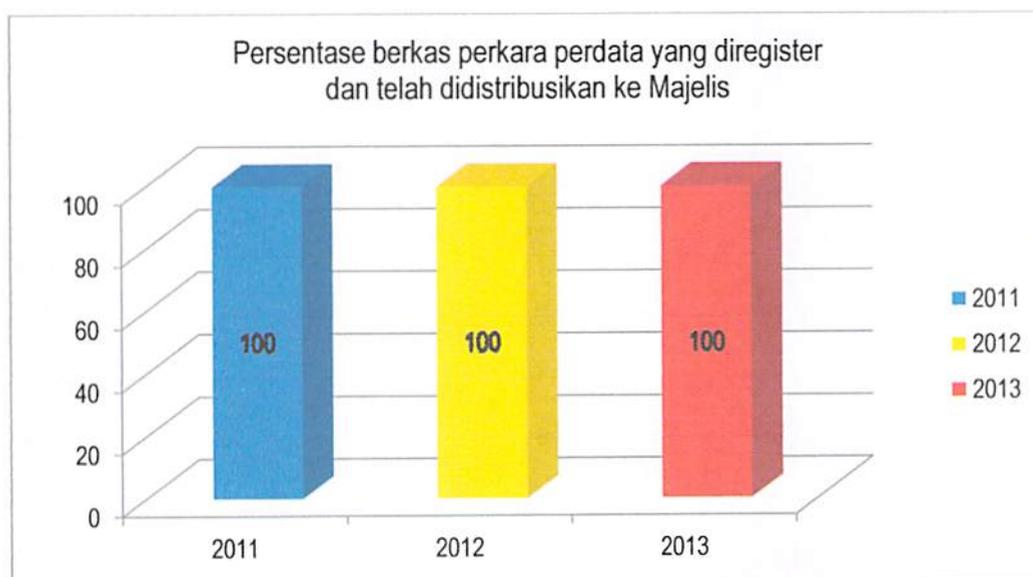


Keterangan :

Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013.

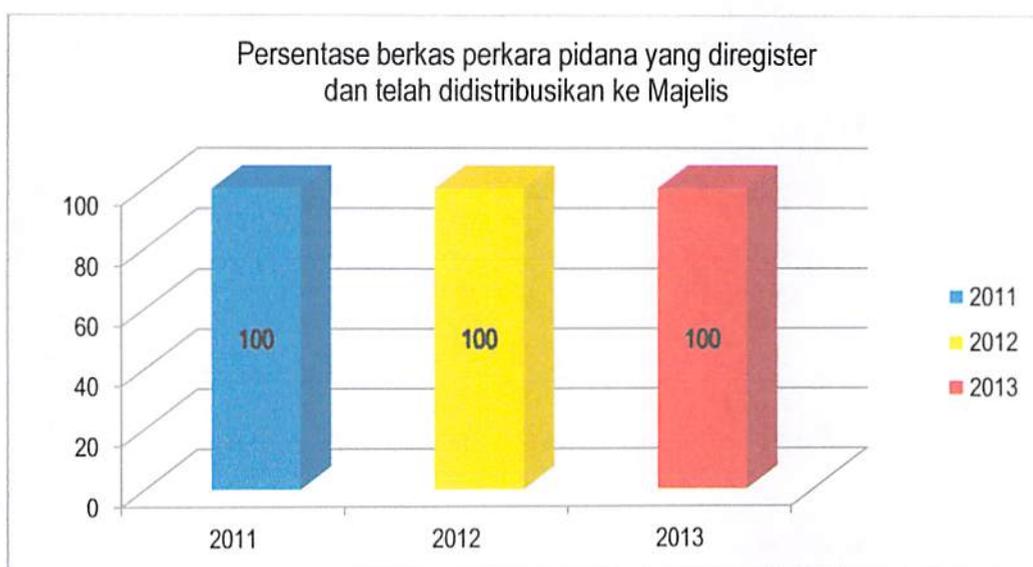
- d. **Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.**

Tahun	Masuk	Di register dan didistribusikan ke Majelis	Persentase %
2011	87	87	100
2012	97	97	100
2013	118	118	100



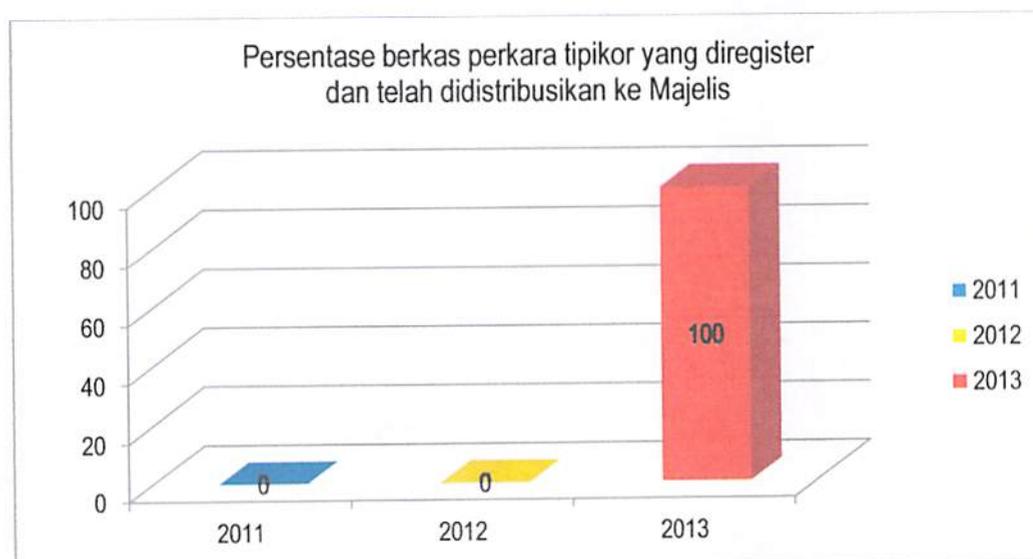
- e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Tahun	Masuk	Di register dan didistribusikan ke Majelis	Persentase %
2011	152	152	100
2012	123	123	100
2013	142	142	100



- f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Tahun	Masuk	Di register dan didistribusikan ke Majelis	Persentase %
2013	38	38	100



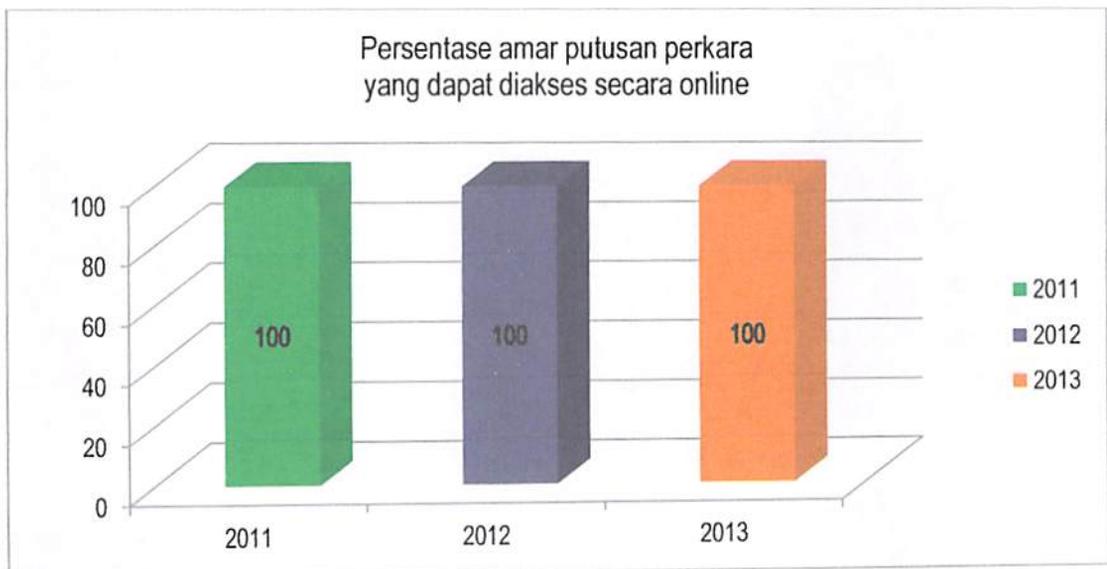
Keterangan :

Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013.

3. **Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).**

Pengembangan Sistem informasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta terintegrasi dengan fungsi-fungsi lembaga peradilan, dapat diakses melalui ***www.pt-yogyakarta.go.id pada menu direktori perkara..*** Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, yaitu Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2013 %	Realisasi 2013 %	Realisasi 2012 %	Realisasi 2011 %
Persentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan	100	100	100	100





#### 4. Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan

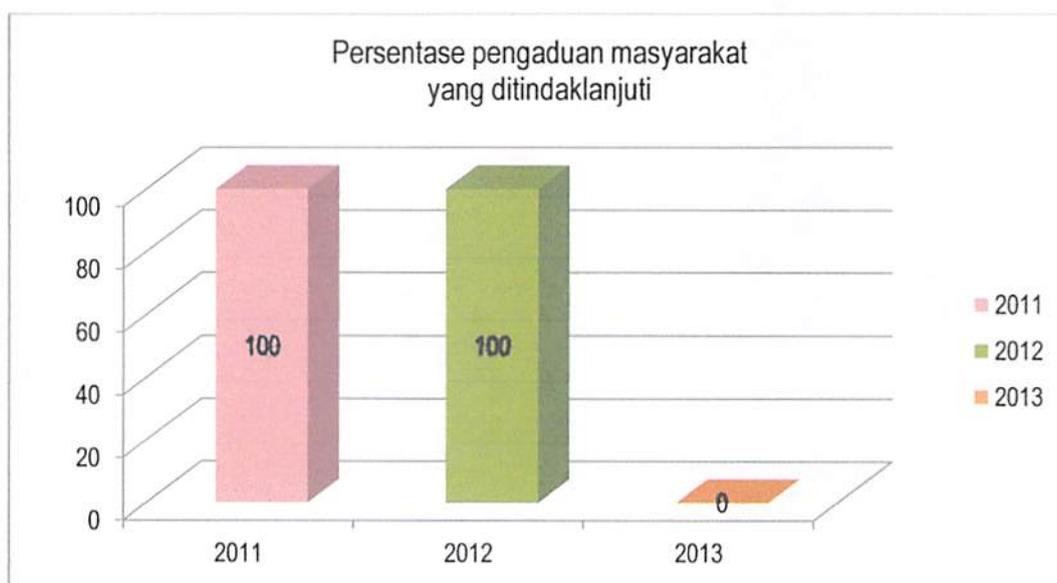
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2013 %	Realisasi 2013 %	Realisasi 2012 %	Realisasi 2011 %
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	0	100	100
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

##### a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti



##### Keterangan :

Pengaduan yang masuk pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selalu mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan berbagai jenis penanganannya :

##### 1. Tahun 2011

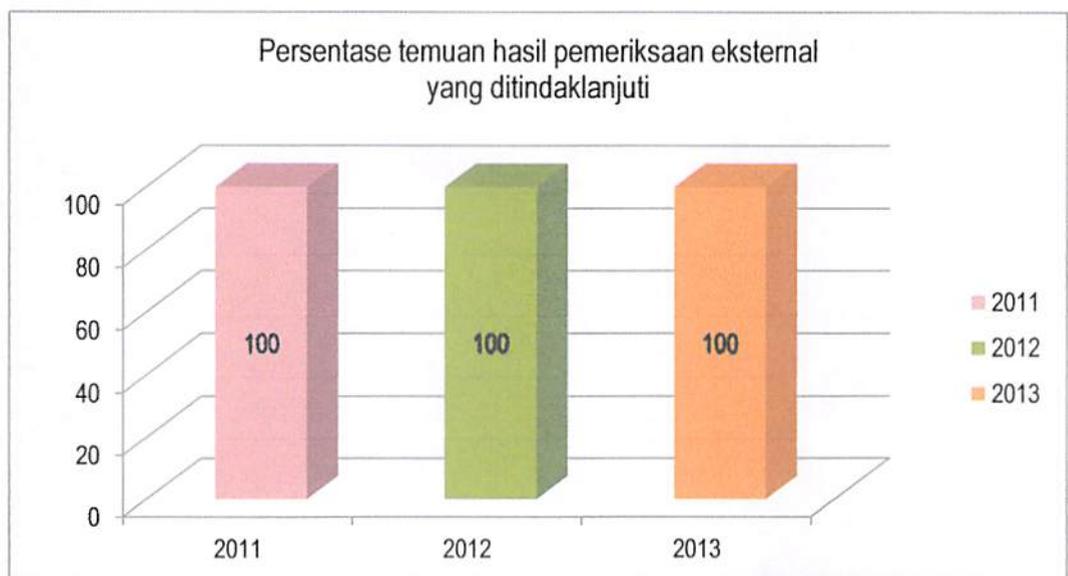
Pengaduan ada 16, terdiri dari :

- 5 Ditindaklanjuti

- 2 diperiksa dan terbukti
  - 3 Diperiksa dan tidak terbukti, diarsipkan
  - 6 Tidak Ditindak lanjuti
    - 3 Tidak ditindak lanjuti karena menyangkut substansi perkara dan perkara masih dalam proses
    - 1 Tidak ditindak lanjuti karena Terlapor sudah mutasi
    - 1 Tidak ditindak lanjuti karena Pelapor tidak serius dengan pengaduannya (tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa )
    - 1 pengaduan tidak layak ditindak lanjuti
  - 2 Didelegasikan ke PN Sleman
  - 2 Diteruskan ke BAWAS
  - 1 pengaduan karena Perkara telah diputus di tingkat banding kewenangan untuk memeriksa bukan kewenangan PTY
  - 1 pengaduan karena PTY tidak berwenang memeriksa/menindak lanjuti karena menyangkut substansi perkara dan Ketua Majaelis Hakim telah pindah ke PN lain
  - 1 masih dalam proses (*telah diselesaikan*)
2. Tahun 2012
- Pengaduan ada : 1
- 1 ditindak lanjuti
3. Tahun 2013
- Pengaduan nihil.

**Pencapaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 sebesar 0% dikarenakan pengaduan masyarakat pada tahun 2013 nihil (tidak ada pengaduan masuk)**

**b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti**



Pencapaian pada sasaran ini dapat mencapai 100% karena semua temuan hasil pemeriksaan baik dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun Badan Pemeriksa Keuangan RI telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

#### 5. Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

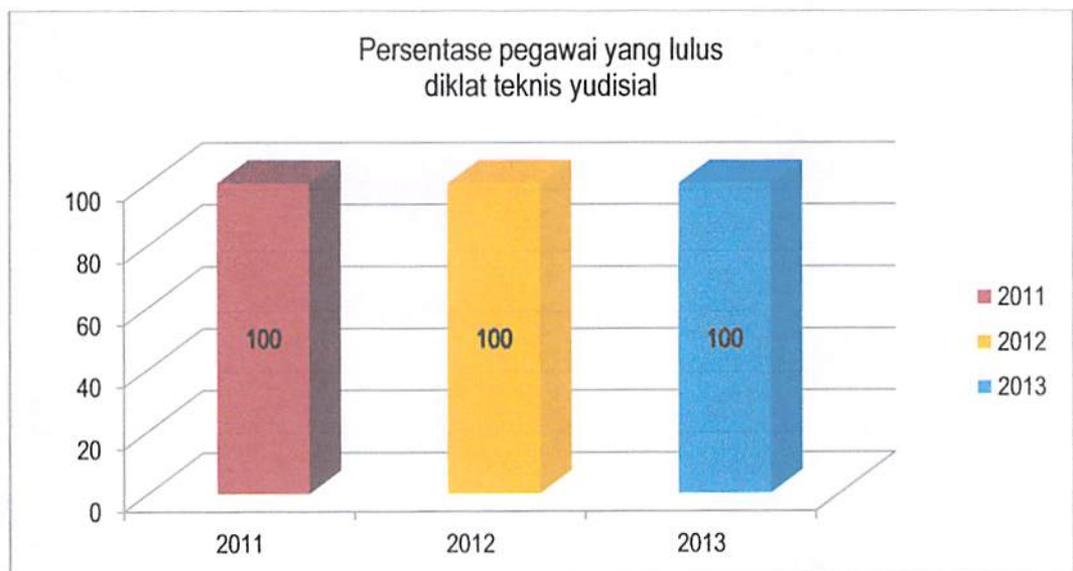
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Yogyakarta direalisasikan dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial dan persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

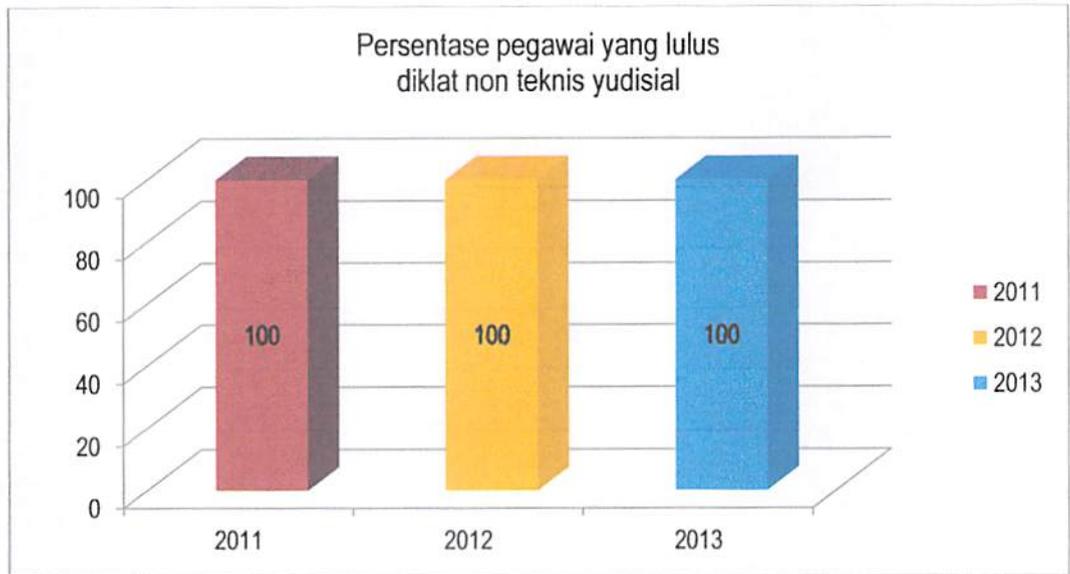
Indikator Kinerja	Target 2013 %	Realisasi 2013 %	Realisasi 2012 %	Realisasi 2011 %
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	100	100	100
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100	100	100	100

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

##### a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial



**b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial**



**6. Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung**

Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung di Pengadilan Tinggi Yogyakarta direalisasikan dengan Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

Sarana dan prasarana terealisasi di tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Meja kerja hakim sebanyak 5 unit
2. Kursi kerja hakim sebanyak 5 unit
3. Almari arsip dan filling cabinet 10 unit
4. Sice sebanyak 2 unit



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama kurun waktu Tahun 2013 yang dituangkan dalam 3 (tiga) program beserta sasaran dan targetnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2013 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 ini secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian target sasaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebesar 89,19%.

### B. SARAN

Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 diharapkan agar terwujud suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif dan akuntabel.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun yang akan datang.

Yogyakarta, Februari 2014

Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Yogyakarta

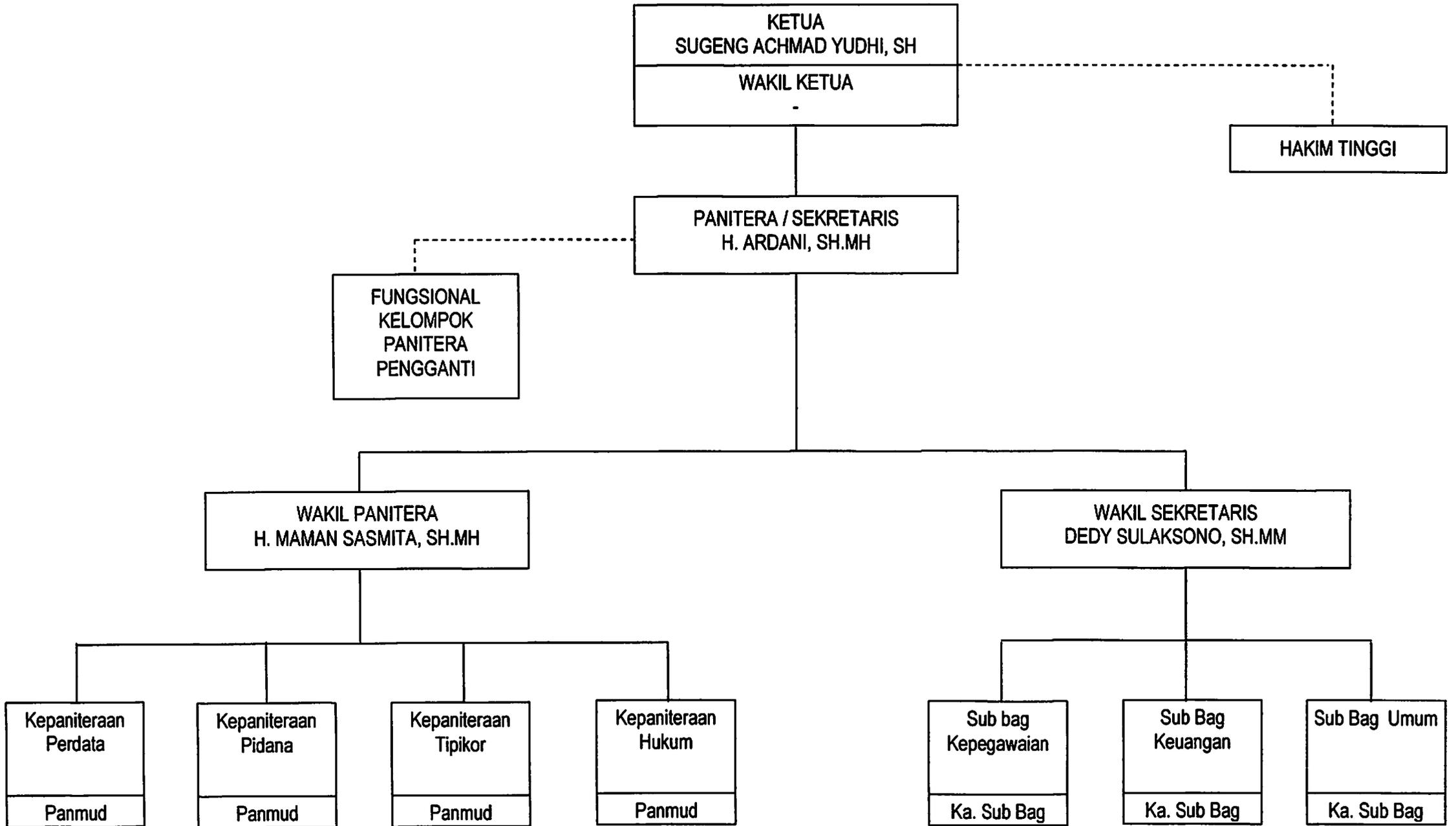
  
d H. ARDANI, SH.MH  
NIP. 19620617 198211 1 001

Ketua  
Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
  
SUGENG ACHMAD YUDHI, SH  
NIP. 19471108 197407 1 001

**BAB V**  
**LAMPIRAN**

1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
3. Rencana Kinerja Tahun 2013
4. Penetapan Kinerja Tahun 2013
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2013
6. Matriks Rencana Strategis Review 2010 – 2014

**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
TAHUN 2013**





**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**  
Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta  
Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415  
Email: pengadilan\_tinggi\_yogyakarta@yahoo.co.id, Website: www.pt-yogyakarta.go.id

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**  
**NOMOR : W13.U/2013/SK/VIII/2013**

**TENTANG**  
**REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tanggal tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi

Yogyakarta Tahun 2010 – 2014 ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2013.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 27 Agustus 2013

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta



*H. Ardani*  
H. ARDANI, SH.MH

NIP : 19620617 198211 1 001

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	Perbandingan perkara pidana yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	Perbandingan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas perkara perdata yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara perdata yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas perkara pidana yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara pidana yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara perdata yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara pidana yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara tindak pidana korupsi yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di <i>web site</i> dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan	Kepaniteraan/Kesekretariatan	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Perikanan, HAM, dan lain-lain dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	Perbandingan antara pengadaan sarana dan prasarana yang terealisasi dengan yang direncanakan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan

**RENCANA KINERJA TAHUNAN****PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA****TAHUN ANGGARAN 2013**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
		h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
		i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %

3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013**  
**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
		h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
		i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %

3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %

**PENGUKURAN KINERJA****TAHUN 2013****PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100%
		c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	0%
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %	80%
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %	93%
		f. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	100%
		g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %	100%
		h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %	100%
		i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %	100%
		2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %			100 %

		c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %
		d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %	100 %

**MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS REVIEW 2010 - 2014.**

- Tujuan : 1. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.  
 2. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan				100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan				100%	100%
		c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan				100%	100%
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan				100%	100%
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan				100%	100%
		f. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan				100%	100%
		g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan				100%	100%
		h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan				100%	100%

		i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan				100%	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap				100%	100%
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap				100%	100%
		c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap				100%	100%
		d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis				100%	100%
		e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis				100%	100%
		f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis				100%	100%

3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.				100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.				100%	100%
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.				100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial				100%	100%
6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung				100%	100%

## **PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta**

**Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415**

**Email : [pengadilan\\_tinggi\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id)**

**Website : [www.pt-yogyakarta.go.id](http://www.pt-yogyakarta.go.id)**